



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 6.7 TAHUN 2023

TENTANG

ARSITEKTUR DATA BIDANG APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan data di Badan Kepegawaian Negara harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip satu Standar Data, satu Metadata, dan satu Portal Data yang sesuai dengan Satu Data Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Arsitektur Data Bidang Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185);
12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 953);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ARSITEKTUR DATA BIDANG APARATUR SIPIL NEGARA.

KESATU : Menetapkan Arsitektur Data Bidang Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023
Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6.7 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

ARSITEKTUR DATA APARATUR SIPIL NEGARA

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
5. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
6. Satu Data bidang ASN yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola data ASN untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, interoperabilitas Data dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
7. Walidata ASN adalah salah satu unit kerja di lingkungan BKN yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Data dan Informasi bidang ASN.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

8. Data Induk adalah Data merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan untuk digunakan bersama.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengelola aliran data dengan menciptakan serangkaian jalur pengelolaan data dari berbagai sumber data yang saling berhubungan satu sama lain untuk mendukung proses bisnis layanan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Keputusan ini bertujuan sebagai pedoman bagi perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan monitoring serta evaluasi data ASN.

C. RUANG LINGKUP

Arsitektur Data ASN terdiri dari:

1. Arsitektur Data Internal;
2. Arsitektur Data Eksternal;
3. Domain Arsitektur Data dan Informasi; dan
4. Metadata Arsitektur Data dan Informasi.

D. ARSITEKTUR DATA INTERNAL

1. Arsitektur data internal di Badan Kepegawaian Negara dikelompokkan sebagai data umum yang merupakan hasil proses bisnis pendukung di Badan Kepegawaian Negara.
2. Arsitektur data internal menggambarkan relasi dukungan layanan dan proses bisnis pendukung Badan Kepegawaian Negara dengan unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara

E. ARSITEKTUR DATA EKSTERNAL

1. Arsitektur data eksternal di Badan Kepegawaian Negara dikelompokkan sebagai data khusus yang merupakan hasil proses bisnis utama di Badan Kepegawaian Negara.
2. Arsitektur data eksternal menggambarkan relasi dukungan layanan dan proses bisnis utama Badan Kepegawaian Negara dengan instansi yang menjadi *stakeholder* (K/L/D) atau yang disebut layanan eksternal.
3. Tujuan dari arsitektur data eksternal ini adalah terintegrasinya data dari layanan aplikasi kepada *stakeholder* (K/L/D) sebagai mitra Badan Kepegawaian Negara.

F. DOMAIN ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

Rincian dari domain arsitektur data dan informasi adalah sebagai berikut:

Kebijakan	Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur terkait
Pemerintahan Umum	[DAD 31] Data dan Informasi Aparatur Negara	Data dan Informasi terkait kearsipan, kepegawaian, pengawasan, akuntabilitas kinerja. Dan layanan administrasi pemerintahan lainnya	[09] Informasi pemerintahan umum [09.02] Data Keuangan [09.03] Data Informasi [09.05] Data Perencanaan Pembangunan Nasional [09.06] Data Aparatur Negara [09.07] Data Kesekretariatan Negara	[DAD 31] [DAL 28] [DAA 09] [DAI 01-03] [DAK 01-03]

Pemetaan domain Arsitektur data dan informasi ke dalam Data Pokok, Data tematik, Data Topik, dan Data Subtopik.

Data Pokok	Data Tematik	Data Topik	Data Subtopik	
[09] Data Pemerintahan Umum	[09.02] Data Keuangan	RAD.09.02.01	Pembinaan Keuangan Instansi	1.Laporan Keuangan
				2.Data Realisasi Anggaran
				3.Data anggaran keuangan
		RAD.09.02.02	Keuangan Negara	1.Laporan pengadaan
				2.Dokumen perencanaan asset
				3.Data Permintaan Pengadaan
	[09.03] Data Informasi	RAD.09.03.05	Pengelolaan Informasi Publik	1.Data Informasi Publik
				2.Laporan Permintaan Data
				3.Data Pengaduan
				4.Laporan Penyelesaian pengaduan
				5.Data Tanggapan Layanan
	[09.05] Data Perencanaan Pembangunan Nasional	RAD.09.05.01	Perencanaan Pembangunan Nasional	1.Rencana Kerja (RENJA)
				2.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL)
				3.Data Hasil Telaah Renja
				4.Data Rencana Kerja dan Anggaran
		RAD.09.05.08	Penyusunan Penganggaran Negara dan Dukungan Strategis Program/Kebijakan	1.Laporan realisasi
				2.Laporan Capaian Kinerja
				3.Hasil Evaluasi RB

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



Data Pokok	Data Tematik		Data Topik		Data Subtopik
	[09.06]	Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01	Pengelolaan Aparatur Negara	1.Data Pegawai
					2.Data Kinerja Pegawai
					3.Data Kenaikan Pangkat Pegawai
					4.Data Mutasi Pegawai
					5.Data Pemberhentian Pegawai
					6.Data Penilaian Kompetensi Pegawai
					7.Data Seleksi Pegawai
					8.Data Pengembangan Pegawai
					9.Data Penetapan NIP Pegawai
					10.Data Index Profesionalitas Pegawai
			RAD.09.06.02	Manajemen Aparatur Sipil Negara	1.Pedoman Indeks Profesionalitas ASN
					2.Standardisasi Teknis Jabatan
					3.Pola Karier
					4.Pedoman Analisis Jabatan
					5.Pedoman Analisis Beban Kerja
					6.Pedoman Evaluasi Jabatan
					7.Pedoman Analisis Kebutuhan Pegawai
					8.Standard kompetensi Jabatan
					9.Klasifikasi/Rumpun Jabatan
					10.Profil Jabatan
					11.Rumusan Kebijakan Teknis
					12.Penilaian Kompetensi ASN
					13.Pelatihan Manajemen Kepegawaian

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

Data Pokok	Data Tematik	Data Topik		Data Subtopik
		RAD.09.06.02	Manajemen Aparatur Sipil Negara	14.Bimtek Manajemen Kepegawaian
				15.Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Kepegawaian
				16.Rancangan peraturan/kebijakan teknis Manajemen ASN
				17.Laporan Harmonisasi Rancangan Peraturan/Kebijakan
				18.Peraturan/Kebijakan Teknis Manajemen ASN
				19.Evaluasi Jabatan
				20.Laporan Penyusunan NSPK
				21.Data Jabatan Fungsional
				22.Data Sertifikasi Jabatan Fungsional
				23.Data Pengembangan Karier JFK
				24.Data Peserta Diklat (Bimtek dll)
				25.Data Sertifikasi Manajemen ASN
				26.Data Perencanaan Diklat (Bimtek dll)
				27.Data Program Diklat (Bimtek dll)
				28.Data Rekomendasi Program Pengembangan
				29.Data Penyelenggaraan Pendidikan
		30.Kenaikan Pangkat		
		31.Dokumen Pertek Kenaikan Pangkat		
		32.Data Pertimbangan Teknis Status dan Kedudukan Kepegawaian		
		33.Dokumen Status dan Kedudukan Kepegawaian		
		34.Dokumen Perubahan Status dan Kedudukan Kepegawaian		
		35.Data Pemberhentian Pegawai		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



Data Pokok	Data Tematik	Data Topik		Data Subtopik
		RAD.09.06.02	Manajemen Aparatur Sipil Negara	36.Pertek Pensiun Pegawai
				37.Data Penetapan Aktivasi PUPNS
				38.Mutasi Kepegawaian
				39.Pertek Mutasi Kepegawaian
				40.Data Usul Formasi Pegawai
				41.Data Penyusunan Kebutuhan
				42.Data Hasil Analisis Kebutuhan
				43.Data Hasil Verifikasi Kebutuhan
				44.Data Pertimbangan teknis Kebutuhan ASN
				45.Data Pertek NIP
				46.Data Penetapan NIP
				47.Data Karis
				48.Data Karsu
				49.Data Karpeg
				50.Data Hasil penilaian kompetensi
				51.Dokumen Standarisasi Metode Penilaian
				52.Laporan Hasil Evaluasi
				53.Data Penilaian Indeks Profesionalitas ASN
				54.Data Pelaporan Kinerja ASN
				55.Data Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja
				56.Data Pelamar
				57.Data Hasil Seleksi
				58.Data Jadwal Seleksi dan Peserta

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



Data Pokok	Data Tematik	Data Topik	Data Subtopik
		RAD.09.06.02	Manajemen Aparatur Sipil Negara
			59.Data Bank Soal
			60.Laporan Permasalahan Data ASN
			61.Laporan Analisis Data ASN
			62.Laporan Permintaan Data
			63.Laporan Pengolahan Data ASN
			64.Laporan Penyajian Data ASN
			65.Laporan Integrasi Data
			66.Data Instansi
			67.Data ASN
		RAD.09.06.04	Pembinaan Reformasi Birokrasi
			1.Dokumen PMRB
			2.Data hasil penilaian RB
		RAD.09.06.07	Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			1.Data Standardisasi
			2.Data Otorisasi Akses
			3.Tata Kelola Data
			4.Laporan Audit Teknologi Informasi
			5.Rencana Kebutuhan Aplikasi
			6.Data Aplikasi yang dibangun
			7.Data Aplikasi yang dikembangkan
			8.Data Layanan Helpdesk Aplikasi
			9.Data FAQ
			10.Rencana Induk SIASN
			11.Peta Jalan SIASN
			12.Pedoman Tata Kelola Aplikasi

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



Data Pokok	Data Tematik	Data Topik	Data Subtopik
		RAD.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	13.Standar Mutu Aplikasi
			14.Penilaian Mutu Aplikasi
			15.Laporan Perencanaan Sistem CAT
			16.Laporan Perancangan Aplikasi Sistem CAT
			17.Laporan Pembangunan Sistem CAT
			18.Laporan Pengembangan Sistem CAT
			19.Data Integrasi CAT
			20.Laporan Penjaminan mutu Sistem CAT
			21.Tata Kelola Keamanan
			22.Standar Keamanan
			23.Laporan Monev Infra TIK
			24.Tata Kelola Infrastruktur
			RAD.09.06.08 Kearsipan Nasional
		2.Data Monev Arsip Kepegawaian	
		3.Laporan Penyelesaian Permasalahan Kelengkapan Dokumen	
		4.Data Arsip Kepegawaian Digital	
		5.Laporan Layanan Peminjaman Arsip	
		6.Laporan Layanan Pemeliharaan Arsip Kepegawaian	
		7.Laporan Penyusutan Arsip Kepegawaian	
		RAD.09.06.09 Pengawasan Aparatur Negara	1.Data Indeks NSPK Manajemen ASN
			2.Data Hukuman Disiplin
			3.Data Pemblokiran Pegawai

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



Data Pokok	Data Tematik		Data Topik		Data Subtopik
	[09.07]	Data Kesekretariatan Negara	09.07.02	Bantuan Hukum	1.Rekomendasi bantuan hukum
					2.Data Kumpulan Laporan Perkara Hukum
					3.Laporan Hasil Penyelesaian Perkara
					4.Laporan Pendampingan Saksi
					5.Data Daftar Perkara dan Solusi
[10] Data Pendukung Utama	[10.01]	Data Kebijakan Pemerintah	10.01.01	Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah	1.Rekomendasi Substansi Kebijakan
					2.Data Susbtansi Kebijakan
					3.Dokumen Kebijakan
					4.Data Peraturan
	[10.02]	Data Manajemen Kegiatan	10.02.01	Data yang merepresentasikan informasi terkait kegiatan	1.Data Kerjasama
					2.Data Arsip Unit Kerja
					3.Data Arsip In Aktif
					4.Data Surat Keluar/Surat Masuk
			10.02.03	Data yang merepresentasikan informasi kegiatan pengawasan	1.Laporan Hasil pengawasan
					2.Data hasil Pengawasan
					3.Laporan Audit

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



G. METADATA ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

1. Entitas metadata arsitektur data dan informasi pada dasarnya hanya terhubung dengan media penyimpanan sebelum selanjutnya digunakan dalam aplikasi. Pada entitas ini tidak terdapat hubungan internal sehingga tidak perlu dilakukan dekomposisi.
2. Atribut metadata arsitektur SPBE merupakan karakteristik atau ciri yang mendefinisikan metadata suatu arsitektur SPBE. Atribut tersebut digunakan untuk membedakan metadata arsitektur SPBE dengan metadata lainnya.
3. Atribut Metadata Data dan Informasi terdiri atas:
 - a. ID;
 - b. Nama Data;
 - c. Uraian Data;
 - d. Tujuan Daa;
 - e. Kode Model Referensi Data;
 - f. Sifat Data;
 - g. Jenis Data;
 - h. Validitas Data;
 - i. Penghasil Data/Produsen Data;
 - j. Penanggung Jawab/Walidata;
 - k. Informasi yang terkait (output);
 - l. Informasi yang terkait (input);
 - m. Interoperabilitas; dan
 - n. ID metadata terkait.

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
1	Pedoman Indeks Profesionalitas ASN	Data Pedoman Indeks Profesionalitas ASN	Pedoman Indeks Profesionalitas ASN	09.06.01.1	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. Jabatan ASN	Dit. PDPIK	Data Penilaian IP ASN	53
2	Standarisasi Teknis Jabatan	Data Standarisasi Teknis Jabatan	Penyusunan Standarisasi Teknis Jabatan	09.06.01.2	Terbuka	Data Kepegawaian	Dit. Jabatan ASN	Dit. PDPIK	Pola Karier, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pegawai, Standar Kompetensi Jabatan, Kalsifikasi Jabatan, Profil Jabatan	3-10
3	Pola Karier	Data Pola Karier ASN	Penyusunan Pola Karier	09.06.01.3	Terbuka	Data Kepegawaian	Dit. Jabatan ASN	Dit. PDPIK	Standarisasi Teknis Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pegawai, Standar Kompetensi Jabatan, Kalsifikasi Jabatan, Profil Jabatan	1,2, 4-10
4	Pedoman Analisis Jabatan	Data hasil Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	09.06.01.4	Terbuka	Data Kepegawaian	Dit. Jabatan ASN	Dit. PDPIK	Standarisasi teknis Jabatan, Pola Karier, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pegawai, Standar Kompetensi Jabatan, Kalsifikasi Jabatan, Profil Jabatan	1-3, 5-10
5	Pedoman Analisis Beban Kerja	Data hasil Analisis Beban Kerja	Penyusunan Analisis Beban Kerja	09.06.01.5	Terbuka	Data Kepegawaian	Dit. Jabatan ASN	Dit. PDPIK	Standarisasi teknis Jabatan, Pola Karier, Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pegawai, Standar Kompetensi Jabatan,	1-4, 6-10

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
									Kalsifikasi Jabatan, Profil Jabatan	
6	Pedoman Evaluasi Jabatan	Data pedoman Evaluasi Jabatan	Penyusunan pedoman Evaluasi Jabatan	09.06.01.6	Terbuka	Data Kepegawaian	Dit. Jabatan ASN	Dit. PDPIK	Pola Karier, Standarisasi teknis Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Analisis Kebutuhan Pegawai, Standar Kompetensi Jabatan, Kalsifikasi Jabatan, Profil Jabatan, Evaluasi Jabatan	1-5,7-10,19
7	Pedoman Analisis Kebutuhan Pegawai	Data hasil Analisis Kebutuhan Pegawai	Penyusunan Analisis Kebutuhan Pegawai	09.06.01.7	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. Jabatan ASN	Dit. PDPIK	Standarisasi teknis Jabatan, Pola Karier, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan, Kalsifikasi Jabatan, Profil Jabatan	1-6, 8-10
8	Standard kompetensi Jabatan	Data Standard kompetensi Jabatan	Penyusunan Standard kompetensi Jabatan	09.06.01.8	Terbuka	Data Kepegawaian	Dit. Jabatan ASN	Dit. PDPIK	Standarisasi teknis Jabatan, Pola Karier, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pegawai, Kalsifikasi Jabatan, Profil Jabatan	1-7, 9-10

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
9	Klasifikasi/Rumpun Jabatan	Data hasil Klasifikasi/Rumpun Jabatan	Penyusunan Klasifikasi/Rumpun Jabatan	09.06.01.9	Terbuka	Data Kepegawaian	Dit. Jabatan ASN	Dit. PDPIK	Standarisasi teknis Jabatan, Pola Karier, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pegawai, Standar Kompetensi Jabatan, Profil Jabatan	1-8,10
10	Profil Jabatan	Data Profil Jabatan	Penetapan Profil Jabatan	09.06.01.10	Terbuka	Data Kepegawaian	Dit. Jabatan ASN	Dit. PDPIK	Standarisasi teknis Jabatan, Pola Karier, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pegawai, Standar Kompetensi Jabatan, Kalsifikasi Jabatan	1-9
11	Rumusan Kebijakan Teknis	Data hasil Rumusan Kebijakan Teknis	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Teknis	09.06.01.11	Terbatas	Data Kebijakan	Dit. PPU	Dit. PDPIK	Rancangan peraturan/ kebijakan teknis manajemen ASN, laporan harmonisasi, rancangan peraturan/ kebijakan, peraturan/ kebijakan teknis manajemen ASN	16-18

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
12	Penilaian Kompetensi ASN	Data hasil Penilaian Kompetensi ASN	Terselenggaranya Penilaian Kompetensi ASN	09.06.01.12	Tertutup	Data Kepegawaian	Puspenkom	Dit. PDPIK	Data hasil penilaian kompetensi & potensi, Dokumen standarisasi metode penilaian, laporan hasil evaluasi penilaian kompetensi dan potensi	50-52
13	Pelatihan Manajemen Kepegawaian	Data Pelatihan Manajemen Kepegawaian	Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Kepegawaian	09.06.01.13	Terbuka	Data Kepegawaian	Pusbang ASN	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi	93,94
14	Bimtek Manajemen Kepegawaian	Data Bimtek Manajemen Kepegawaian	Terselenggaranya Bimtek Manajemen Kepegawaian	09.06.01.14	Terbuka	Data Kepegawaian	Pusbang ASN	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi	93,94
15	Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Kepegawaian	Data Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Kepegawaian	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Kepegawaian	09.06.01.15	Terbuka	Data Kepegawaian	Pusbang ASN	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi	93,94
16	Rancangan peraturan/kebijakan teknis Manajemen ASN	Data hasil Rancangan peraturan/kebijakan teknis Manajemen ASN	Tersusunnya Rancangan peraturan/kebijakan teknis Manajemen ASN	09.06.01.16	Terbatas	Data Kebijakan	Dit. PPU	Dit. PDPIK	Rumusan Kebijakan Teknis, laporan harmonisasi, rancangan peraturan/ kebijakan, peraturan/ kebijakan teknis manajemen ASN	11, 17-18
17	Laporan Harmonisasi Rancangan Peraturan/Kebijakan	Data hasil Laporan Harmonisasi Rancangan Peraturan/Kebijakan	Tersusunnya Laporan Harmonisasi Rancangan Peraturan/Kebijakan	09.06.01.17	Terbatas	Data Kebijakan	Dit. PPU	Dit. PDPIK	Rumusan Kebijakan Teknis, Rancangan peraturan/ kebijakan teknis manajemen ASN, rancangan peraturan/ kebijakan,	11,16,18

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
									peraturan/ kebijakan teknis manajemen ASN	
18	Peraturan/Kebijakan Teknis Manajemen ASN	Data Peraturan/Kebijakan Teknis Manajemen ASN	Tersusunnya Peraturan/Kebijakan Teknis Manajemen ASN	09.06.01.18	Terbuka	Data Kebijakan	Dit. PPU	Dit. PDPIK	Rumusan Kebijakan teknis, Rancangan peraturan/ kebijakan teknis manajemen ASN, laporan harmonisasi, rancangan peraturan/ kebijakan	11,16,17
19	Evaluasi Jabatan	Data hasil Evaluasi Jabatan	Tersusunnya Evaluasi Jabatan	09.06.01.19	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. Kompensasi	Dit. PDPIK	Pedoman Evaluasi Jabatan, Pola Karier, Standarisasi teknis Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Analisis Kebutuhan Pegawai, Standar Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan, Profil Jabatan	2-10
20	Laporan Penyusunan NSPK	Data hasil Laporan Penyusunan NSPK	Tersusunnya Laporan Penyusunan NSPK	09.06.01.20	Terbatas	Data Kebijakan	Dit. PPU	Dit. PDPIK	Data Indeks NSPK Manajemen ASN	95
21	Data Jabatan Fungsional	Data Jabatan Fungsional	Tersusunnya Data Jabatan Fungsional	09.06.01.21	Terbuka	Data Kepegawaian	Dit. Jabatan ASN	Dit. PDPIK	Standarisasi Teknis Jabatan, analisis jabatan, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, klasifikasi/ rumpun jabatan, profil jabatan	2,4,6,8-10

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
22	Data Sertifikasi Jabatan Fungsional	Data hasil Sertifikasi Jabatan Fungsional	Tersusunnya Sertifikasi Jabatan Fungsional	09.06.01.22	Terbatas	Data Kepegawaian	Pusbang ASN	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi	93,94
23	Data Pengembangan Karier JFK	Data hasil Pengembangan Karier JFK	Terselenggaranya Pengembangan Karier JFK	09.06.01.23	Terbatas	Data Kepegawaian	Pusbang ASN	Dit. PDPIK	Pola Karier, Data ASN, Data Instansi	3, 93,94
24	Data Peserta Diklat (Bimtek dll)	Data Peserta Diklat (Bimtek dll)	Terselenggaranya Diklat (Bimtek dll)	09.06.01.24	Terbatas	Data Kepegawaian	Pusbang ASN	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi	93,94
25	Data Sertifikasi Manajemen ASN	Data Sertifikasi Manajemen ASN	Terselenggaranya Sertifikasi Manajemen ASN	09.06.01.25	Terbatas	Data Kepegawaian	Pusbang ASN	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi	93,94
26	Data Perencanaan Diklat (Bimtek dll)	Data Perencanaan Diklat (Bimtek dll)	Tersusunnya Perencanaan Diklat (Bimtek dll)	09.06.01.26	Terbatas	Data Kepegawaian	Pusbang ASN	Dit. PDPIK	Standarisasi teknis jabatan, standar kompetensi jabatan, profil jabatan	2,8,10
27	Data Program Diklat (Bimtek dll)	Data Program Diklat (Bimtek dll)	Tersusunnya Program Diklat (Bimtek dll)	09.06.01.27	Terbuka	Data Kepegawaian	Pusbang ASN	Dit. PDPIK	Standarisasi teknis jabatan, standar kompetensi jabatan, profil jabatan	2,8,10
28	Data Rekomendasi Program Pengembangan	Data hasil Rekomendasi Program Pengembangan	Tersusunnya Rekomendasi Program Pengembangan	09.06.01.28	Terbatas	Data Kepegawaian	Pusbang ASN	Dit. PDPIK	Standarisasi teknis jabatan, standar kompetensi jabatan, profil jabatan	2,8,10
29	Data Penyelenggaraan Pendidikan	Data hasil Penyelenggaraan Pendidikan	Tersusunnya Penyelenggaraan Pendidikan	09.06.01.29	Terbuka	Data Kepegawaian	Pusbang ASN	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi	93,94
30	Laporan Kenaikan Pangkat	Data Laporan Kenaikan Pangkat	Terwujudnya Kenaikan Pangkat	09.06.02.1	Terbuka	Data Kepegawaian	Dit. P&K	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, dokumen pertek KP	93,94,31
31	Dokumen Pertek KP	Data hasil Pertek KP	Penetapan Pertek KP	09.06.02.2	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. P & K	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Laporan Kenaikan Pangkat	93,94,30

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
32	Data Pertimbangan Teknis Status dan Kedudukan Kepegawaian	Data Hasil Pertimbangan Teknis Status dan Kedudukan Kepegawaian	Tersusunnya Pertimbangan Teknis Status dan Kedudukan Kepegawaian	09.06.02.3	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. SKK	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Dokumen Status dan Kedudukan Kepegawaian, Dokumen Perubahan Status dan Kedudukan Kepegawaian	93,94,33,34
33	Dokumen Status dan Kedudukan Kepegawaian	Data hasil penetapan Status dan Kedudukan Kepegawaian	Penetapan Status dan Kedudukan Kepegawaian	09.06.02.4	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. SKK	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Data Pertimbangan Teknis Status dan Kedudukan Kepegawaian, Dokumen Perubahan Status dan Kedudukan Kepegawaian,	93,94,32,34
34	Dokumen Perubahan Status dan Kedudukan Kepegawaian	Data hasil Perubahan Status dan Kedudukan Kepegawaian	Penetapan Perubahan Status dan Kedudukan Kepegawaian	09.06.02.5	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. SKK	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Data Pertimbangan Teknis Status dan Kedudukan Kepegawaian, Dokumen Status dan Kedudukan Kepegawaian,	93,94,32,33
35	Data Pemberhentian Pegawai	Data hasil penetapan Pemberhentian Pegawai	Terlaksananya Pemberhentian Pegawai	09.06.02.6	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. Pensiun	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Pertek Pensiun Pegawai	93,94,36
36	Pertek Pensiun Pegawai	Data hasil penetapan Pertek Pensiun Pegawai	Tersusunnya Pertek Pensiun Pegawai	09.06.02.7	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. Pensiun	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Data Pemberhentian Pegawai	93,94,35

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
37	Data Penetapan Aktivasi PUPNS	Data hasil Penetapan Aktivasi PUPNS	Tersusunnya Penetapan Aktivasi PUPNS	09.06.02.8	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. SKK	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Data Pertimbangan Teknis Status dan Kedudukan Kepegawaian Dokumen Status dan Kedudukan Kepegawaian, Dokumen Perubahan Status dan Kedudukan Kepegawaian	93,94, 32-34
38	Laporan Mutasi Kepegawaian	Data hasil Laporan Mutasi Kepegawaian	Terselenggaranya Mutasi Kepegawaian	09.06.02.9	Terbuka	Data Kepegawaian	Dit. P & K	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Pertek Mutasi Kepegawaian	93,94, 39
39	Pertek Mutasi Kepegawaian	Data hasil penetapan Pertek Mutasi Kepegawaian	Tersusunnya Pertek Mutasi Kepegawaian	09.06.02.10	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. P&K	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Laporan Mutasi Kepegawaian	93,94, 38
40	Data Usul Formasi Pegawai	Data hasil penrhitungan Usul Formasi Pegawai	Tersusunnya Usul Formasi Pegawai	09.06.02.11	Terbatas	Data Kepegawaian	Pusrenbut	Dit. PDPIK	Analisis Jabatan, Analis Beban Kerja, Data Penyusunan Kebutuhan, Data Hasil Analisis Kebutuhan, Data Hasil Verifikasi Kebutuhan, Data Pertimbangan teknis Kebutuhan ASN	4,5, 41-44
41	Data Penyusunan Kebutuhan	Data hasil Penyusunan Kebutuhan	Tersusunnya Penyusunan Kebutuhan	09.06.02.12	Terbatas	Data Kepegawaian	Pusrenbut	Dit. PDPIK	Analisis Jabatan, Analis Beban Kerja, Data Usul Formasi Pegawai , Data Hasil Analisis Kebutuhan, Data Hasil Verifikasi	4,5,42-44

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
									Kebutuhan, Data Pertimbangan teknis Kebutuhan ASN	
42	Data Hasil Analisis Kebutuhan	Data Hasil Analisis Kebutuhan	Tersusunnya Analisis Kebutuhan	09.06.02.13	Terbatas	Data Kepegawaian	Pusrenbut	Dit. PDPIK	Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Data Usul Formasi Pegawai, Data Penyusunan Kebutuhan, Data Hasil Verifikasi Kebutuhan, Data Pertimbangan teknis Kebutuhan ASN	4,5, 41,43-44
43	Data Hasil Verifikasi Kebutuhan	Data Hasil Verifikasi Kebutuhan	Terselenggaraanya Verifikasi Kebutuhan	09.06.02.14	Terbatas	Data Kepegawaian	Pusrenbut	Dit. PDPIK	Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Data Usul Formasi Pegawai, Data Penyusunan Kebutuhan, Data Hasil Analisis Kebutuhan, Data Pertimbangan teknis Kebutuhan ASN	4,5, 41,42,44
44	Data Pertimbangan teknis Kebutuhan ASN	Data hasil Pertimbangan teknis Kebutuhan ASN	Tersusunnya Pertimbangan teknis Kebutuhan ASN	09.06.02.15	Terbatas	Data Kepegawaian	Pusrenbut	Dit. PDPIK	Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Data Usul Formasi Pegawai, Data Penyusunan Kebutuhan, Data Hasil Analisis Kebutuhan, Data Hasil Verifikasi Kebutuhan	4,5, 41-43

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
45	Data Pertek NIP	Data penetapan Pertek NIP	Tersusunnya Pertek NIP	09.06.02.16	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit P & K	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Data Penetapan NIP	93,94,46
46	Data Penetapan NIP	Data Penetapan NIP	Terwujudnya Penetapan NIP	09.06.02.17	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit P & K	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Data Pertek NIP	93,94,45
47	Data Karis	Data pencetakan Karis	Pengelolaan Karis	09.06.02.18	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit P & K	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi	93,94
48	Data Karsu	Data pencetakan Karsu	Pengelolaan Karsu	09.06.02.19	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit P & K	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi	93,94
49	Data Karpeg	Data pencetakan Karpeg	Pengelolaan Karpeg	09.06.02.20	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit P & K	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi	93,94
50	Data Hasil penilaian kompetensi & Potensi	Data Hasil penilaian kompetensi & Potensi	Terselenggranya penilaian kompetensi & Potensi	09.06.02.21	Tertutup	Data Kepegawaian	Puspenkom	Dit. PDPIK	Penilaian Kompetensi ASN, Dokumen standarisasi metode penilaian, laporan hasil evaluasi penilaian kompetensi dan potensi	12,51,52
51	Dokumen Standarisasi Metode Penilaian	Data hasil Standarisasi Metode Penilaian	Tersusunnya Standarisasi Metode Penilaian	09.06.02.22	Terbatas	Data Kepegawaian	Puspenkom	Dit. PDPIK	Penilaian Kompetensi ASN, data hasil penilaian potensi & kompetensi, laporan hasil evaluasi penilaian kompetensi dan potensi	12,50,52

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
52	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Kompetensi & Potensi	Data hasil Evaluasi Penilaian Kompetensi & Potensi	Terselenggaranya Evaluasi Penilaian Kompetensi & Potensi	09.06.02.23	Terbatas	Data Kepegawaian	Puspenkom	Dit. PDPIK	Penilaian Kompetensi ASN, data hasil penilaian potensi & kompetensi, Dokumen Standarisasi Metode Penilaian	12,50,51
53	Data Penilaian Indeks Profesionalitas ASN	Data hasil Penilaian Indeks Profesionalitas ASN	Terselenggaranya Penilaian Indeks Profesionalitas ASN	09.06.02.24	Terbatas	Data Evaluasi	Dit. Jabatan ASN	Dit. PDPIK	IP ASN, Data ASN, Data Instansi	1, 93,94
54	Data Pelaporan Kinerja ASN	Data hasil Pelaporan Kinerja ASN	Tersusunnya Pelaporan Kinerja ASN	09.06.02.25	Terbuka	Data evaluasi	Dit. Kinerja	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Data Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja	93,94, 55
55	Data Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja	Data Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja	Tersusunnya Evaluasi Pelaporan Kinerja	09.06.02.26	Terbatas	Data Evaluasi	Dit. Kinerja	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Data Pelaporan Kinerja	93,94, 54
56	Data Pelamar	Data Pelamar	Pengelolaan Pelamar	09.06.02.27	Terbatas	Data Seleksi	PPSS	Dit. PDPIK	Data Hasil Seleksi, Data Jadwal Seleksi dan Peserta	57,58
57	Data Hasil Seleksi	Data Hasil Seleksi	Terselenggaranya Seleksi	09.06.02.28	Terbuka	Data Seleksi	PPSS	Dit. PDPIK	Data Pelamar, Data Jadwal Seleksi dan Peserta	56,58
58	Data Jadwal Seleksi dan Peserta	Data Jadwal Seleksi dan Peserta	Tersusunnya Jadwal Seleksi dan Peserta	09.06.02.29	Terbuka	Data Seleksi	PPSS	Dit. PDPIK	Data Hasil Seleksi, Data Pelamar	56,57
59	Data Bank Soal	Data Bank Soal	Tersusunnya Bank Soal	09.06.03.1	Tertutup	Data Seleksi	PPSS	Dit. PDPIK	Standar kompetensi jabatan, profil jabatan	8, 10
60	Laporan Permasalahan Data ASN	Data hasil Laporan Permasalahan Data ASN	Pengelolaan Permasalahan Data ASN	09.06.03.2	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. PDPIK	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, laporan kenaikan pangkat, dokumen status dan	93,94,30,33, 35,38,46,53, 54

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
									kedudukan kepegawaian, data pemberhentian pegawai, laporan mutasi kepegawaian, data penetapan nip, IP ASN, data pelaporan kinerja ASN	
61	Laporan Analisis Data ASN	Data hasil Laporan Analisis Data ASN	Pengelolaan Analisis Data ASN	09.06.03.3	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. PDPIK	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, laporan kenaikan pangkat, dokumen status dan kedudukan kepegawaian, data pemberhentian pegawai, laporan mutasi kepegawaian, data penetapan nip, IP ASN, data pelaporan kinerja ASN	93,94, 30,33,35,38, 46,53,54
62	Laporan Permintaan Data	Data Hasil Laporan Permintaan Data	Pengelolaan Permintaan Data	09.06.03.4	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. PDPIK	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, laporan kenaikan pangkat, dokumen status dan kedudukan kepegawaian, data pemberhentian pegawai, laporan mutasi kepegawaian, data penetapan nip, IP ASN, data pelaporan kinerja ASN	93,94, 30,33,35,38, 46,53,54

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
63	Data Standardisasi	Data hasil laporan Standardisasi	Tersusunnya Standardisasi	09.06.03.5	Terbuka	Data Kepegawaian	Dit. PDPIK	Dit. PDPIK	Tata Kelola Data	67
64	Data Otorisasi Akses	Data hasil Otorisasi Akses	Terkelolanya Otorisasi Akses	09.06.03.6	Tertutup	Data Kepegawaian	Dit. PDPIK	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi	93,94
65	Laporan Pengolahan Data ASN	Data hasil Laporan Pengolahan Data ASN	Terselenggaranya Pengolahan Data ASN	09.06.03.7	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. PDPIK	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, laporan kenaikan pangkat, dokumen status dan kedudukan kepegawaian, data pemberhentian pegawai, laporan mutasi kepegawaian, data penetapan nip, IP ASN, data pelaporan kinerja ASN	93,94, 30,33,35,38, 46,53,54
66	Laporan Penyajian Data ASN	Data Hasil Laporan Penyajian Data ASN	Terselenggaranya Penyajian Data ASN	09.06.03.8	Terbuka	Data Kepegawaian	Dit. PDPIK	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, laporan kenaikan pangkat, dokumen status dan kedudukan kepegawaian, data pemberhentian pegawai, laporan mutasi kepegawaian, data penetapan nip, IP ASN, data pelaporan kinerja ASN	93,94, 30,33,35,38, 46,53,54
67	Tata Kelola Data	Data Pedoman Tata Kelola Data	Tersusunnya tata kelola data	09.06.03.9	Terbuka	Data TIK	Dit. PDPIK	Dit. PDPIK	Laporan Audit Teknologi Informasi, Laporan Integrasi Data, Data Standarisasi	68,69,63

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
68	Laporan Audit Teknologi Informasi	Data hasil Laporan Audit Teknologi Informasi	Terselenggaranya Audit Teknologi Informasi	09.06.03.10	Terbatas	Data TIK	Dit. PPSIASN	Dit. PDPIK	Tata kelola keamanan, pedoman tata kelola aplikasi, tata kelola Data, Laporan Integrasi Data, Tata Kelola Infrastuktur	67,69,77,106,109
69	Laporan Integrasi Data	Data hasil Laporan Integrasi Data	Terselenggaranya Integrasi Data	09.06.03.11	Terbatas	Data TIK	Dit. PPSIASN	Dit. PDPIK	Tata Kelola Data, Laporan Audit Teknologi Informasi	67,68
70	Rencana Kebutuhan Aplikasi	Data hasil Rencana Kebutuhan Aplikasi	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Aplikasi	09.06.03.12	Terbatas	Data TIK	Dit. PPSIASN	Dit. PDPIK	Data Aplikasi yang dibangun, Data Aplikasi yang dikembangkan, Rencana Induk SIASN, Peta Jalan SIASN, Pedoman Tata Kelola Aplikasi, Standar Mutu Aplikasi, Penilaian Mutu Aplikasi	71,72,75-79
71	Data Aplikasi yang dibangun	Data hasil Data Aplikasi yang dibangun	Pengelolaan Aplikasi yang dibangun	09.06.03.13	Terbuka	Data TIK	Dit. PPSIASN	Dit. PDPIK	Rencana Kebutuhan Aplikasi, Data Aplikasi yang dikembangkan, Rencana Induk SIASN, Peta Jalan SIASN, Pedoman Tata Kelola Aplikasi, Standar Mutu Aplikasi, Penilaian Mutu Aplikasi	70,72,75-79
72	Data Aplikasi yang dikembangkan	Data daftar Aplikasi yang dikembangkan	Pengelolaan Aplikasi yang dikembangkan	09.06.03.14	Terbuka	Data TIK	Dit. PPSIASN	Dit. PDPIK	Rencana Kebutuhan Aplikasi, Data Aplikasi yang dibangun, Rencana	70,71,75-79

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
									Induk SIASN, Peta Jalan SIASN, Pedoman Tata Kelola Aplikasi, Standar Mutu Aplikasi, Penilaian Mutu Aplikasi	
73	Data Layanan Helpdesk Aplikasi	Data daftar Layanan Helpdesk Aplikasi	Terselenggaranya Layanan Helpdesk Aplikasi	09.06.03.15	Terbuka	Data TIK	Dit. PPSIASN	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Data FAQ	93,94,74
74	Data FAQ	Data daftar FAQ	Pengelolaan FAQ	09.06.03.16	Terbuka	Data TIK	Dit. PPSIASN	Dit. PDPIK	Data Layanan Helpdesk Aplikasi	73
75	Rencana Induk SIASN	Data Rencana Induk SIASN	Tersusunnya Rencana Induk SIASN	09.06.03.17	Terbatas	Data TIK	Dit. PPSIASN	Dit. PDPIK	Rencana Kebutuhan Aplikasi, Data Aplikasi yang dibangun, Data Aplikasi yang dikembangkan, Peta Jalan SIASN, Pedoman Tata Kelola Aplikasi, Standar Mutu Aplikasi, Penilaian Mutu Aplikasi	70-72,74-79
76	Peta Jalan SIASN	Data Peta Jalan SIASN	Tersusunnya Peta Jalan SIASN	09.06.03.18	Terbatas	Data TIK	Dit. PPSIASN	Dit. PDPIK	Rencana Kebutuhan Aplikasi, Data Aplikasi yang dibangun, Data Aplikasi yang dikembangkan, Rencana Induk SIASN, Pedoman Tata Kelola Aplikasi, Standar Mutu Aplikasi, Penilaian Mutu Aplikasi	70-72,74-75,77-79

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
77	Pedoman Tata Kelola Aplikasi	Data Pedoman Tata Kelola Aplikasi	Tersusunnya Pedoman Tata Kelola Aplikasi	09.06.03.19	Terbuka	Data TIK	Dit. PPSIASN	Dit. PDPIK	Rencana Kebutuhan Aplikasi, Data Aplikasi yang dibangun, Data Aplikasi yang dikembangkan, Rencana Induk SIASN, Peta Jalan SIASN, Standar Mutu Aplikasi, Penilaian Mutu Aplikasi	70-72,74-76,78,79
78	Standar Mutu Aplikasi	Data Standar Mutu Aplikasi	Tersusunnya Standar Mutu Aplikasi	09.06.03.20	Terbuka	Data TIK	Dit. PPSIASN	Dit. PDPIK	Rencana Kebutuhan Aplikasi, Data Aplikasi yang dibangun, Data Aplikasi yang dikembangkan, Rencana Induk SIASN, Peta Jalan SIASN, Pedoman Tata Kelola Aplikasi, Penilaian Mutu Aplikasi	70-72,74-77,79
79	Penilaian Mutu Aplikasi	Data Penilaian Mutu Aplikasi	Tersusunnya Penilaian Mutu Aplikasi	09.06.03.21	Terbatas	Data TIK	Dit. PPSIASN	Dit. PDPIK	Rencana Kebutuhan Aplikasi, Data Aplikasi yang dibangun, Data Aplikasi yang dikembangkan, Rencana Induk SIASN, Peta Jalan SIASN, Pedoman Tata Kelola Aplikasi, Standar Mutu Aplikasi,	70-72,74-78

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
80	Data Arsip Kepegawaian	Data laporan Arsip Kepegawaian	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	09.06.03.22	Tertutup	Data Kepegawaian	Dit. AK	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Data Monev Arsip Kepegawaian, Data Arsip kepegawaian digital	93,94,81,83
81	Data Monev Arsip Kepegawaian	Data Monev Arsip Kepegawaian	Terselenggaranya Monev Arsip Kepegawaian	09.06.03.23	Terbuka	Data Kepegawaian	Dit. AK	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Data Arsip Kepegawaian, Data Arsip kepegawaian digital	93,94,80,83
82	Laporan Penyelesaian Permasalahan Kelengkapan Dokumen	Data Laporan Penyelesaian Permasalahan Kelengkapan Dokumen	Terselenggaranya Penyelesaian Permasalahan Kelengkapan Dokumen	09.06.03.24	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. AK	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Data Monev Arsip Kepegawaian, Data Arsip kepegawaian, data arsip kepegawaian digital	93,94,80,81,83
83	Data Arsip Kepegawaian Digital	Data Arsip Kepegawaian Digital	Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital	09.06.03.25	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. AK	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Data Monev Arsip Kepegawaian, Data Arsip kepegawaian	93,94,80,81
84	Laporan Layanan Peminjaman Arsip	Data Laporan Layanan Peminjaman Arsip	Terselenggaranya Layanan Peminjaman Arsip	09.06.03.26	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. AK	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Data Monev Arsip Kepegawaian, Data Arsip kepegawaian, data arsip kepegawaian digital	93,94,81,80,83
85	Laporan Layanan Pemeliharaan Arsip Kepegawaian	Data Laporan Layanan Pemeliharaan Arsip Kepegawaian	Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Arsip Kepegawaian	09.06.03.27	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. AK	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Data Monev Arsip Kepegawaian, Data Arsip kepegawaian, data arsip	93,94,80,81,83

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
									kepegawaian digital	
86	Laporan Penyusutan Arsip Kepegawaian	Data Laporan Penyusutan Arsip Kepegawaian	Pengelolaan Penyusutan Arsip Kepegawaian	09.06.03.28	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit. AK	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi, Data Monev Arsip Kepegawaian, Data Arsip kepegawaian, data arsip kepegawaian digital	93,94,80,81, 83
87	Laporan Perencanaan Sistem CAT	Data Laporan Perencanaan Sistem CAT	Terselenggaranya Perencanaan Sistem CAT	09.06.03.29	Terbatas	Data Seleksi	PPSS	Dit. PDPIK	Laporan Perancangan Aplikasi Sistem CAT, Laporan Pembangunan Sistem CAT, Laporan Pengembangan Sistem CAT, Laporan Penjaminan mutu Sistem CAT	88-90,92
88	Laporan Perancangan Aplikasi Sistem CAT	Data Laporan Perancangan Aplikasi Sistem CAT	Terselenggaranya Perancangan Aplikasi Sistem CAT	09.06.03.30	Terbatas	Data Seleksi	PPSS	Dit. PDPIK	Laporan Perencanaan Aplikasi Sistem CAT, Laporan Perancangan Aplikasi Sistem CAT, Laporan Pembangunan Sistem CAT, Laporan Pengembangan Sistem CAT, Laporan Penjaminan mutu Sistem CAT	87,89,90,92

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
89	Laporan Pembangunan Sistem CAT	Data Laporan Pembangunan Sistem CAT	Terselenggaranya Pembangunan Sistem CAT	09.06.03.31	Terbatas	Data Seleksi	PPSS	Dit. PDPIK	Laporan Perencanaan Aplikasi Sistem CAT, Laporan Perancangan Aplikasi Sistem CAT, Laporan perancangan Sistem CAT, Laporan Pengembangan Sistem CAT, Laporan Penjaminan mutu Sistem CAT	87,88,90,92
90	Laporan Pengembangan Sistem CAT	Data Laporan Pengembangan Sistem CAT	Terselenggaranya Pengembangan Sistem CAT	09.06.03.32	Terbatas	Data Seleksi	PPSS	Dit. PDPIK	Laporan Perencanaan Aplikasi Sistem CAT, Laporan Perancangan Aplikasi Sistem CAT, Laporan Pembangunan Sistem CAT, Laporan Penjaminan mutu Sistem CAT	87-89,92
91	Data Integrasi CAT	Data hasil Integrasi CAT	Terselenggaranya Integrasi CAT	09.06.03.33	Terbatas	Data Seleksi	PPSS	Dit. PDPIK	Data Pelamar	56
92	Laporan Penjaminan mutu Sistem CAT	Data Laporan Penjaminan mutu Sistem CAT	Terselenggaranya Penjaminan mutu Sistem CAT	09.06.03.34	Terbatas	Data Seleksi	PPSS	Dit. PDPIK	Laporan Perancangan Aplikasi Sistem CAT, Laporan Perancangan Aplikasi Sistem CAT,	87-90

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
									Laporan Pembangunan Sistem CAT, Laporan Pengembangan Sistem CAT, Laporan perencanaan Sistem CAT	
93	Data Instansi	Data listing Instansi	Pengelolaan Instansi	09.06.03.35	Terbuka	Data Kepegawaian	Dit.PDIK	Dit.PDIK	Pelatihan Manajemen Kepegawaian, Bimtek Manajemen Kepegawaian, Penyele ngaraan Pendidikan Ilmu Kepegawaian ,Data Sertifikasi Jabatan Fungsional, Data Pengembangan Karier JFK, Data Peserta Diklat, Data Sertifikasi Manajemen ASN, Data Penyelenggaraan Pendidikan, Laporan Kenaikan Pangkat, Dokumen Pertek SKK, Dokumen SKK, Dokumen Perubahan SKK, Data Pemberhentian Pegawai, Pertek Pensiun Pegawai, Data Penetapan Aktivasi PUPNS, Laporan Mutasi	13,14,15,22, 23,24,25,29, 30,31,32,33, 34,35,36,37, 38,39,45- 49,53,54,55, 60-62,64- 66,73,80- 86,96,97,124 ,95,105,118- 120,130

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
									Kepegawaian, Pertek Mutasi, Data Pertek NIP, Data Penetapan NIP, Data Karis, Data Karsu, Data Karpeg, Data Penilaian IP ASN, Data Pelaporan Kinerja, Data Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja, Laporan Permasalahan Data, Laporan Analisis Data ASN, Laporan Permintaan Data, Data otorisasi akses, Laporan Pengolahan Data ASN, Laporan Penyajian Data ASN, Data Layanan Helpdesk Aplikasi, Data Arsip Kepegawaian, Data Monev Arsip Kepegawaian, Laporan Penyelesaian Permasalahan Kelengkapan Dokumen, Data Arsip Kepegawaian Digital, Laporan Layanan Peminjaman Arsip, Laporan Layanan Pemeliharaan Arsip, Laporan Penyusutan	

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
									Arsip Kepegawaian, Data Hukuman Disiplin, Data Pemblokiran Pegawai, Laporan Pendampingan Saksi, Data Indeks NSPK Manajemen ASN, Laporan Permintaan Data, Data Pengaduan, Laporan Penyelesaian Pengaduan, Data Tanggapan Layanan, Data Kerjasama	
94	Data ASN	Data listing ASN	Pengelolaan ASN	09.06.03.36	Terbatas	Data Kepegawaian	Dit.PDIK	Dit.PDIK	Pelatihan Manajemen Kepegawaian, Bimtek Manajemen Kepegawaian, Penyele ngaraan Pendidikan Ilmu Kepegawaian ,Data Sertifikasi Jabatan Fungsional, Data Pengembangan Karier JFK, Data Peserta Diklat, Data Sertifikasi Manajemen ASN, Data Penyelenggaraan Pendidikan, Laporan Kenaikan Pangkat, Dokumen Pertek KP, Data Pertek SKK,	13,14,15,22, 23,24,25,29, 30,31,32,33, 34,35,36,37, 38,39,45- 49,53,54,55, 60-62,64- 66,73,80- 86,96,97,124 ,105,118- 120

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
									Dokumen SKK, Dokumen Perubahan SKK, Data Pemberhentian Pegawai, Pertek Pensiun Pegawai, Data Penetapan Aktivasi PUPNS, Laporan Mutasi Kepegawaian, Pertek Mutasi, Data Pertek NIP, Data Penetapan NIP, Data Karis, Data Karsu, Data Karpeg, Data Penilaian IP ASN ,Data Pelaporan Kinerja, Data Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja, Laporan Permasalahan Data, Laporan Analisis Data ASN, Laporan Permintaan Data, Data otorisasi akses, Laporan Pengolahan Data ASN, Laporan Penyajian Data ASN, Data Layanan Helpdesk Aplikasi, Data Arsip Kepegawaian, Data Monev Arsip Kepegawaian, Laporan Penyelesaian Permasalahan	

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
									Kelengkapan Dokumen, Data Arsip Kepegawaian Digital, Laporan Layanan Peminjaman Arsip, Laporan Layanan Pemeliharaan Arsip, Laporan Penyusutan Arsip Kepegawaian, Data Hukuman Disiplin, Data Pemblokiran Pegawai, Laporan Pendampingan Saksi, Laporan Permintaan Data, Data Pengaduan, Laporan Penyelesaian Pengaduan, Data Tanggapan Layanan	
95	Data Indeks NSPK Manajemen ASN	Data hasil pengukuran Indeks NSPK Manajemen ASN	Tersusunnya Indeks NSPK Manajemen ASN	09.06.04.1	Terbuka	Data Evaluasi	WASDAL	Dit. PDPIK	Data Instansi, Laporan Penyusunan NSPK	20,94
96	Data Hukuman Disiplin	Data hasil penetapan Hukuman Disiplin	Pengelolaan Hukuman Disiplin	09.06.04.2	Terbatas	Data Kepegawaian	WASDAL	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi	93,94
97	Data Pemblokiran Pegawai	Data penetapan Pemblokiran Pegawai	Pengelolaan Pemblokiran Pegawai	09.06.04.3	Terbatas	Data Kepegawaian	WASDAL	Dit. PDPIK	Data ASN, Data Instansi	93,9
98	Laporan Keuangan	Data Hasil Laporan Keuangan	Pengelolaan Keuangan	09.02.01.1	Terbuka	Data Keuangan	Biro Keuangan	Dit. PDPIK	Data Realisasi Anggaran, Data anggaran keuangan	99,100
99	Data Realisasi Anggaran	Data hasil Realisasi Anggaran	Pengelolaan Realisasi Anggaran	09.02.01.2	Terbatas	Data Keuangan	Biro Keuangan	Dit. PDPIK	Laporan Keuangan, Data anggaran keuangan	98,100

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
100	Data anggaran keuangan	Data pelaporan anggaran keuangan	Pengelolaan anggaran keuangan	09.02.01.3	Terbatas	Data Keuangan	Biro Keuangan	Dit. PDPIK	Laporan Keuangan, Data anggaran keuangan	98,99
101	Laporan pengadaan	Data Laporan pengadaan	Pengelolaan pengadaan	09.02.02.1	Terbuka	Data BMN	Biro Umum	Dit. PDPIK	Dokumen perencanaan asset, Data Permintaan Pengadaan	102,103
102	Dokumen perencanaan asset	Data laporan perencanaan asset	Pengelolaan perencanaan asset	09.02.02.2	Terbatas	Data BMN	Biro Umum	Dit. PDPIK	Laporan pengadaan, Data Permintaan Pengadaan	101,103
103	Data Permintaan Pengadaan	Data laporan Permintaan Pengadaan	Pengelolaan Permintaan Pengadaan	09.02.02.3	Terbatas	Data BMN	Biro Umum	Dit. PDPIK	Laporan pengadaan, Dokumen perencanaan asset	101,102
104	Data Informasi Publik	Data laporan Informasi Publik	Data Informasi Publik	09.03.01.1	Terbuka	Data Kepegawaian	BHHK	Dit. PDPIK	Laporan Permintaan Data	105
105	Laporan Permintaan Data	Data Laporan Permintaan Data	Pengelolaan Permintaan Data	09.03.01.2	Terbuka	Data Kepegawaian	BHHK	Dit. PDPIK	Data Informasi Publik, Data ASN, Data Instansi	105,93.94
106	Tata Kelola Keamanan	Data pedoman Tata Kelola Keamanan	Tersusunnya Tata Kelola Keamanan	09.03.02.1	Terbuka	Data TIK	Dit. INTI	Dit. PDPIK	Laporan Audit Teknologi Informasi, Standar Keamanan	68,107
107	Standar Keamanan	Data Standar Keamanan	Tersusunnya Standar Keamanan	09.03.02.2	Terbatas	Data TIK	Dit. INTI	Dit. PDPIK	Laporan Audit Teknologi Informasi, Tata Kelola Keamanan	68,106
108	Laporan Monev Infra TIK	Data Laporan Monev Infra TIK	Terselenggaranya Monev Infra TIK	09.03.02.3	Terbatas	Data TIK	Dit. INTI	Dit. PDPIK	Laporan Audit Teknologi Informasi, Tata Kelola Infrastruktur	68,109
109	Tata Kelola Infrastruktur	Data Pedoman Tata Kelola Infrastruktur	Tersusunnya Tata Kelola Infrastuktur	09.03.02.4	Terbuka	Data TIK	Dit. INTI	Dit. PDPIK	Laporan Audit Teknologi Informasi, Laporan Monev Infra TIK	68,108

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
110	RENJA	Data RENJA	Pengelolaan RENJA	09.05.01.1	Terbatas	Data Perencanaan	Biro Reno	Dit. PDPIK	RKAKL, Data Hasil Telaah Renja, Data Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan realisasi, Laporan Capaian Kinerja	111-115
111	RKAKL	Data RKAKL	Pengelolaan RKAKL	09.05.01.2	Terbatas	Data Perencanaan	Biro Reno	Dit. PDPIK	RENJA, Data Hasil Telaah Renja, Data Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan realisasi, Laporan Capaian Kinerja	110,112-115
112	Data Hasil Telaah Renja	Data Hasil Telaah Renja	Pengelolaan Telaah Renja	09.05.01.3	Terbatas	Data Perencanaan	Biro Reno	Dit. PDPIK	RKAKL,RENJA, Data Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan realisasi, Laporan Capaian Kinerja	110,111,113-115
113	Data Rencana Kerja dan Anggaran	Data Rencana Kerja dan Anggaran	Pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran	09.05.01.4	Terbatas	Data Perencanaan	Biro Reno	Dit. PDPIK	RKAKL,RENJA, Data Hasil Telaah Renja, Laporan realisasi, Laporan Capaian Kinerja	110-112,114,115
114	Laporan realisasi	Data Laporan realisasi	Tercapainya realisasi	09.05.02.1	Terbatas	Data Evaluasi	Biro Reno	Dit. PDPIK	RKAKL,RENJA, Data Hasil Telaah Renja, Data Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Capaian Kinerja	110-113,115
115	Laporan Capaian Kinerja	Data	Tersusunnya Capaian Kinerja	09.05.02.2	Terbatas	Data Evaluasi	Biro Reno	Dit. PDPIK	RKAKL,RENJA, Data Hasil Telaah Renja, Data Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan realisasi	110-114

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
116	Hasil Evaluasi RB	Data Hasil Evaluasi RB	Terselenggaranya Evaluasi RB	09.05.02.3	Terbatas	Data Evaluasi	Biro Reno	Dit. PDPIK	Dokumen PMRB, Data hasil penilaian RB	117,118
117	Dokumen PMRB	Data Laporan PMRB	Terselenggaranya PMRB	09.05.03.1	Terbatas	Data Evaluasi	Biro Reno	Dit. PDPIK	Hasil Evaluasi RB ,Data hasil penilaian RB	116,118
118	Data hasil penilaian RB	Data hasil penilaian RB	Terselenggaranya penilaian RB	09.05.03.2	Terbatas	Data Evaluasi	Biro Reno	Dit. PDPIK	Hasil Evaluasi RB, Dokumen PMRB	116,117
119	Data Pengaduan	Data laporan Pengaduan	Pengelolaan Pengaduan	09.07.01.1	Terbuka	Data Kepegawaian	BHHK	Dit. PDPIK	Laporan Penyelesaian pengaduan, Data Tanggapan Layanan	120,121
120	Laporan Penyelesaian pengaduan	Data Laporan Penyelesaian pengaduan	Pengelolaan Penyelesaian pengaduan	09.07.01.2	Terbuka	Data Kepegawaian	BHHK	Dit. PDPIK	Data Pengaduan, Data Tanggapan Layanan	119,121
121	Data Tanggapan Layanan	Data Tanggapan Layanan	Pengelolaan Tersusunnya Tanggapan Layanan	09.07.01.3	Terbuka	Data Kepegawaian	BHHK	Dit. PDPIK	Data Pengaduan, Laporan Penyelesaian pengaduan	119,120
122	Rekomendasi bantuan hukum	Data Rekomendasi bantuan hukum	Tersusunnya Rekomendasi bantuan hukum	09.07.02.1	Tertutup	Data Kepegawaian	BANKUM	Dit. PDPIK	Data Kumpulan Laporan Perkara Hukum, Laporan Hasil Penyelesaian Perkara, Laporan Pendampingan Saksi, Data Daftar Perkara dan Solusi	123-126

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
123	Data Kumpulan Laporan Perkara Hukum	Data Kumpulan Laporan Perkara Hukum	Tersusunnya Data Kumpulan Laporan Perkara Hukum	09.07.02.2	Tertutup	Data Kepegawaian	BANKUM	Dit. PDPIK	Rekomendasi bantuan hukum , Laporan Hasil Penyelesaian Perkara, Laporan Pendampingan Saksi, Data Daftar Perkara dan Solusi	122,124-126
124	Laporan Hasil Penyelesaian Perkara	Data Laporan Hasil Penyelesaian Perkara	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	09.07.02.3	Tertutup	Data Kepegawaian	BANKUM	Dit. PDPIK	Rekomendasi bantuan hukum ,Data Kumpulan Laporan Perkara Hukum, Laporan Pendampingan Saksi, Data Daftar Perkara dan Solusi	122,123,125, 126
125	Laporan Pendampingan Saksi	Data Laporan Pendampingan Saksi	Pengelolaan Pendampingan Saksi	09.07.02.4	Tertutup	Data Kepegawaian	BANKUM	Dit. PDPIK	Rekomendasi bantuan hukum ,Data Kumpulan Laporan Perkara Hukum, Laporan Hasil Penyelesaian Perkara,Data Daftar Perkara dan Solusi, Data ASN, Data Instansi	122-124,126

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
126	Data Daftar Perkara dan Solusi	Data Daftar Perkara dan Solusi	Pengelolaan Perkara dan Solusi	09.07.02.5	Tertutup	Data Kepegawaian	BANKUM	Dit. PDPIK	Rekomendasi bantuan hukum ,Data Kumpulan Laporan Perkara Hukum, Laporan Hasil Penyelesaian Perkara, Laporan Pendampingan Saksi	122-125
127	Rekomendasi Substansi Kebijakan	Data Rekomendasi Substansi Kebijakan	Tersusunnya Rekomendasi Substansi Kebijakan	10.01.01.1	Terbatas	Data Kebijakan	BHHK	Dit. PDPIK	Data Susbtansi Kebijakan, Dokumen Kebijakan, Data Peraturan	128-130
128	Data Susbtansi Kebijakan	Data Susbtansi Kebijakan	Tersusunnya Susbtansi Kebijakan	10.01.01.2	Terbatas	Data Kebijakan	BHHK	Dit. PDPIK	Rekomendasi Substansi Kebijakan, Dokumen Kebijakan, Data Peraturan	127,129,130
129	Dokumen Kebijakan	Data Kebijakan	Pengelolaan Kebijakan	10.01.01.3	Terbuka	Data Kebijakan	BHHK	Dit. PDPIK	Rekomendasi Substansi Kebijakan,Data Susbtansi Kebijakan, Data Peraturan	127,128,130
130	Data Peraturan	Data Peraturan	Pengelolaan Peraturan	10.01.01.4	Terbuka	Data Kebijakan	BHHK	Dit. PDPIK	Rekomendasi Substansi Kebijakan,Data Susbtansi Kebijakan, Dokumen Kebijakan	127-129
131	Data Kerjasama	Data Kerjasama	Pengelolaan Kerjasama	10.02.01.1	Terbuka	Data Kebijakan	BHHK	Dit. PDPIK	Data Instansi	93

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
132	Data Arsip Unit Kerja	Data Arsip Unit Kerja	Pengelolaan Arsip Unit Kerja	10.02.01.2	Terbatas	Data Kepegawaian	Biro Umum	Dit. PDPIK	Data Arsip In Aktif, Data Surat Keluar/Surat Masuk	133,134
133	Data Arsip In Aktif	Data Arsip In Aktif	Pengelolaan Arsip In Aktif	10.02.01.3	Terbatas	Data Kepegawaian	Biro Umum	Dit. PDPIK	Data Arsip Unit Kerja, Data Surat Keluar/Surat Masuk	132,134
134	Data Surat Keluar/Surat Masuk	Data Surat Keluar/Surat Masuk	Pengelolaan Surat Keluar/Surat Masuk	10.02.01.4	Terbatas	Data Kepegawaian	Biro Umum	Dit. PDPIK	Data Arsip Unit Kerja ,Data Arsip In Aktif	132,133
135	Laporan Hasil pengawasan	Data Laporan Hasil pengawasan	Pengelolaan pengawasan	10.02.03.1	Tertutup	Data Evaluasi	INSPEKTORAT	Dit. PDPIK	Data hasil Pengawasan, Laporan Audit	136,137
136	Data hasil Pengawasan	Data hasil Pengawasan	Pengelolaan hasil Pengawasan	10.02.03.2	Tertutup	Data Evaluasi	INSPEKTORAT	Dit. PDPIK	Laporan Hasil pengawasan, Laporan Audit	135,137
137	Laporan Audit	Data Laporan Audit	Pengelolaan Audit	10.02.03.3	Tertutup	Data Evaluasi	INSPEKTORAT	Dit. PDPIK	Laporan Hasil pengawasan, Data hasil Pengawasan	135,136
138	Data Pegawai	Data listing pegawai BKN	Pengelolaan pegawai BKN	RAD.09.06.01.1	Terbatas	Data Kepegawaian	Biro SDM	Dit.PDIK	Data Kinerja Pegawai, Data KP Pegawai, Data Mutasi Pegawai, Data Pemberhentian Pegawai, Data Penilaian Kompetensi Pegawai, Data Seleksi Pegawai, Data	139-147

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
									Pengembangan Pegawai, Data Penetapan NIP Pegawai, Data Index Profesionalitas Pegawai	
139	Data Kinerja Pegawai	Data hasil Pelaporan Kinerja Pegawai BKN	Tersusunnya Pelaporan Kinerja Pegawai BKN	RAD.09.06.01.2	Terbatas	Data Kepegawaian	Biro SDM	Dit.PDIK	Data Pegawai	138
140	Data Kenaikan Pangkat Pegawai	Data Laporan Kenaikan Pangkat Pegawai BKN	Terwujudnya Kenaikan Pangkat Pegawai BKN	RAD.09.06.01.3	Terbatas	Data Kepegawaian	Biro SDM	Dit.PDIK	Data Pegawai	138
141	Data Mutasi Pegawai	Data hasil Laporan Mutasi Pegawai BKN	Terselenggaranya Mutasi Pegawai BKN	RAD.09.06.01.4	Terbatas	Data Kepegawaian	Biro SDM	Dit.PDIK	Data Pegawai	138
142	Data Pemberhentian Pegawai	Data hasil penetapan Pemberhentian Pegawai BKN	Terlaksananya Pemberhentian Pegawai BKN	RAD.09.06.01.5	Terbatas	Data Kepegawaian	Biro SDM	Dit.PDIK	Data Pegawai	138
143	Data Penilaian Kompetensi Pegawai	Data hasil Penilaian Kompetensi Pegawai BKN	Terselenggaranya Penilaian Kompetensi Pegawai BKN	RAD.09.06.01.6	Terbatas	Data Kepegawaian	Biro SDM	Dit.PDIK	Data Pegawai	138
144	Data Seleksi Pegawai	Data Hasil Seleksi Pegawai BKN	Terselenggaranya Seleksi Pegawai BKN	RAD.09.06.01.7	Terbatas	Data Kepegawaian	Biro SDM	Dit.PDIK	Data Pegawai	138
145	Data Pengembangan Pegawai	Data hasil pengembangan kompetensi pegawai BKN (diklat gelar/ non gelar)	Terselenggaranya pengembangan kompetensi pegawai BKN	RAD.09.06.01.8	Terbatas	Data Kepegawaian	Biro SDM	Dit.PDIK	Data Pegawai	138

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab/ Walidata	Interoperabilitas	ID Metadata terkait
146	Data Penetapan NIP Pegawai	Data Penetapan NIP Pegawai BKN	Terwujudnya Penetapan NIP Pegawai BKN	RAD.09.06.01.9	Terbatas	Data Kepegawaian	Biro SDM	Dit.PDIK	Data Pegawai	138
147	Data Index Profesionalitas Pegawai	Data hasil Penilaian Indeks Profesionalitas Pegawai BKN	Terselenggaranya Penilaian Indeks Profesionalitas Pegawai BKN	RAD.09.06.01.10	Terbatas	Data Kepegawaian	Biro SDM	Dit.PDIK	Data Pegawai	138

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA,

%

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

